

PERCAYAKAN PENYELESAIAN KONFLIK KE APARAT

PSHT Akan Patuhi 'Dhawuh Ngarsa Dalem'

SLEMAN (KR) - Insiden bentrokan di sejumlah wilayah DIY yang melibatkan simpatisan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan Brajamusti, Minggu (4/6) lalu, mendapat perhatian Pemkab Sleman. Menyikapi konflik tersebut, Pemkab Sleman bersama dengan Forkopimda Sleman menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan Pengurus Cabang PSHT Kabupaten Sleman, Selasa (6/6) malam di Ruang Rapat Sembada Kantor Sekretariat Kabupaten Sleman.

Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menyelesaikan konflik tersebut. Serta mengimbau semua pihak terkait untuk memperhatikan dan mematuhi sabda/pesan Sri Sultan Hamengku Buwana X dalam menyikapi peristiwa tersebut dengan mengedepankan laku sareh, sabar dan mawas diri serta senantiasa menggelorakan semangat *bebayan-paseduluran*.

"Segala permasalahan maupun kesalahpahaman dapat diselesaikan secara damai dan bermartabat dengan dilandasi nilai-nilai dan prinsip musyawarah-mufakat," kata Danang, seraya menyebut Pemkab Sleman bersama Forkopimda Sleman beserta seluruh mitra Pemerintah, berkomitmen untuk menjaga kondusifitas di wilayah Sleman dengan memperkuat koordinasi.

Komitmen yang sama juga disampaikan Ketua Bidang Organisasi Pengurus Pusat PSHT Arie Sujito. Menurutnya, warga PSHT di Sleman pada khususnya dan DIY pada umumnya berkomitmen untuk menjaga kondusifitas wilayah dan menurunkan ketegangan yang terjadi saat ini. "PSHT DIY telah secara resmi memohon maaf kepada seluruh masyarakat DIY atas insiden yang terjadi. Kami juga terus mengimbau warga PSHT dari luar DIY untuk tidak perlu datang ke DIY dan mempercayakan semua penyelesaian kasus kepada aparat yang berwenang," jelasnya.

Arie Sujito menambahkan, pihaknya akan mematuhi *dhawuh Ngarsa Dalem* untuk meredakan situasi dan mengutamakan prinsip *bebayan-paseduluran*. Meskipun insiden keriuhan tidak terjadi di wilayah Sleman, namun upaya preventif dan preventif telah dilakukan oleh aparat keamanan. Sementara Kapolresta Sleman AKBP Yuswanto Ardi menyampaikan, Sle-



Wabup Danang Maharsa, jajaran Forkopimda dan perwakilan PSHT usai menggelar pertemuan.

man menjadi perlintasan utama akses menuju DIY. Sehingga jajarannya terus melakukan upaya preventif dan preventif sebelum

mengambil langkah represif dalam penanganan kejadian apapun. "Langkah antisipasi perlu terus dilakukan. Kami mengapresiasi partisipasi

aktif Warga PSHT Sleman yang senantiasa mendukung cipta kondisi wilayah yang aman dan tertib," katanya. (Has)-f

JELANG IDULADHA,

Wabup Minta Awasi Lalulintas Ternak

SLEMAN (KR) - Menjelang Idul Adha tahun 2023, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sleman menggelar High Level Meeting yang dipimpin Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa di Ruang Sembada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Rabu (7/6). Kegiatan ini dihadiri oleh TPID dan perwakilan perangkat daerah terkait serta Forkopimda Kabupaten Sleman.



Wabup Danang Maharsa memimpin rapat TPID antisipasi kenaikan harga.

Menurut Danang Maharsa, penyelenggaraan High Level Meeting TPID ini merupakan upaya untuk mensinergikan langkah yang harus dilakukan dalam mengendalikan harga dan menjaga ketersediaan stok atau pasokan kebutuhan pokok di Kabupaten Sleman, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha. "Saat ini kita bersinergi untuk menentukan langkah yang harus dilakukan menjelang Idul Adha. Ke depan TPID tidak hanya menasar persoalan yang memicu gejolak harga melalui pendekatan yang bersifat jangka pendek. Namun secara bertahap direncanakan mulai menyentuh pada solusi atas berbagai persoalan yang bersifat struktural," katanya.

Danang juga meminta OPD yang terkait dengan

kegiatan ekonomi, untuk mengimbau masyarakat agar tidak menimbun dan melakukan *panic buying* menjelang hari Raya Idul Adha. "Saya berharap OPD terkait perlu melakukan pemantauan harga dan ketersediaan stok di lapangan untuk mengantisipasi kemungkinan naiknya jumlah kebutuhan yang diikuti dengan kenaikan harga komoditas. Sebab kenaikan harga tersebut tentunya akan berimbas langsung dan memberatkan masyarakat," jelasnya.

Selain ketersediaan komoditas dan stabilitas harga, Danang menyampaikan beberapa hal yang juga perlu diperhatikan TPID menjelang Idul Adha tahun 2023. Salah satunya mewaspada penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). "Tingginya kesadaran ma-

sarakat untuk berkorban menyebabkan kebutuhan dan permintaan hewan kurban terus meningkat. Hal itu menyebabkan tingginya arus lalu lintas hewan, terutama sapi dan kambing dari luar Sleman. Disinilah peran pemerintah untuk melakukan pengawasan," ujar Danang.

Ditambahkan, pengawasan terhadap hewan kurban yang masuk dari luar daerah perlu dilakukan untuk memastikan kelayakan dan kesehatan hewan yang akan disembelih, sebagai upaya meminimalisir hal yang tidak diinginkan, termasuk penyebaran PMK. "Kami minta seluruh pihak untuk memberikan edukasi masyarakat untuk dapat menyembelih dan menangani hewan kurban dengan benar, sehat dan halal," pungkasnya. (Has)-d

Beras Merah di Ngemplak Dibeli Rp 5.400/Kg

NGEMPLAK (KR) - Bupati Sleman Kustini bersama sejumlah pejabat melakukan panen padi beras merah di bulak Malangrejo Kalurahan Wedomartani Ngemplak, Rabu (7/6). Sebelum melakukan panen, terlebih dahulu diadakan prosesi tradisi wiwitan, tradisi masyarakat Jawa sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang telah diberikan kepada para petani. Tradisi ini juga bertujuan agar senantiasa diberikan hasil panen yang baik.

Bupati mengaku senang serta mengapresiasi kegiatan yang diadakan oleh Kalurahan Wedomartani ini. Selain itu juga mengapresiasi para kelompok tani yang telah membudidayakan padi beras merah di Kabupaten Sleman, khususnya di Wedomartani.

Menurutnya, penanaman beras merah ini layak untuk terus didukung karena memiliki banyak kelebihan, salah satunya baik untuk kesehatan. "Beras merah ini baik untuk kesehatan, karena rendah kalori. Selain

itu masa tanamnya juga lebih singkat, yakni 75 hari. Dari segi pupuk juga lebih ekonomis," kata Bupati.

Sementara Lurah Wedomartani Teguh Budiyanto mengatakan, kegiatan ini merupakan panen perdana beras merah di tempat tersebut. Adapun lahan yang digunakan untuk penanaman padi beras merah ini seluas 10 hektare. Diharapkan dengan

penanaman beras merah ini dapat meningkatkan kesehatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.

"Nanti akan kita musyawarahkan dengan gapoktan lagi untuk mengembangkan dan memperluas lagi. Karena selain dikonsumsi sendiri, kemarin juga ada yang mau beli, perkilo rata-rata Rp 5.400," jelas Teguh. (Has)-d



Tradisi wiwitan digelar sebelum memulai panen padi.

LAPORAN PANSUS III DPRD KABUPATEN SLEMAN

Tingkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

SLEMAN (KR) - DPRD Kabupaten Sleman telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Dengan raperda tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, padukuhun dan pemerintah kalurahan untuk peduli mengelola sampah rumah tangga.

Ketua Pansus III DPRD Kabupaten Sleman tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, Hj Sumaryatin SSos MA mengatakan, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu diperlukan peraturan daerah yang baru.

"Karena sudah tidak relevan dengan perundang-undang, makanya Perda No 4 Tahun 2015 kami ubah. Hal itu untuk menyesuaikan



Hj Sumaryatin SSos MA

dengan perundang-undang yang ada," terang perempuan yang kerap disapa Atin ini, Rabu (7/6).

Dikatakan, Sleman ini merupakan penyumbang sampah terbesar di DIY. Setiap harinya bisa sampai ratusan ton sampah yang dihasilkan masyarakat. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah itu dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan bencana. "Raperda ini sebagai salah satu upaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Tujuannya agar pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah

rumah tangga tertangani secara sistematis," paparnya.

Untuk menjaga kebersihan dan kerapian, perlu ada partisipasi masyarakat, padukuhun dan pemerintah kalurahan. Dimana kepedulian dalam pengelolaan sampah rumah tangga perlu ditingkatkan. "Jangan sampai masyarakat, padukuhun dan kalurahan tidak peduli dengan sampah. Dalam raperda ini akan mengatur tentang partisipasi dari masyarakat, padukuhun dan kalurahan," tambah politisi dari Fraksi PKS ini.

Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, perlu digalakkan edukasi pengelolaan sampah mulai anak PAUD dan keluarga terkecil. Harapannya sampah sudah dipilah dan dikelola sejak dini yaitu dari keluarga. "Edukasi ini cukup perlu digalakkan secara masif. Baik di sekolah mulai dari PAUD sampai SMA, maupun lingkungan keluarga terkecil. Supaya pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga sudah berjalan dengan baik," tuturnya.

Selain itu, raperda juga akan mengatur tentang pembentukan dewan persampahan di tingkat kabupaten, kapanewon, kalurahan dan padukuhun. Hal itu dalam rangka rebug bersama antar seluruh stake holder sampah dan menyelesaikan persoalan sampah dari unit yang paling kecil. "Dewan persampahan di semua tingkat mulai dari padukuhun sampai kabupaten itu kami rasa cukup tinggi. Supaya permasalahan sampai mulai dari tingkat bawah sampai kabupaten bisa tertangani dengan baik," ucapnya.

Di samping itu, perlu menyertakan aspek sampah dalam perizinan daerah yang memaksa para pengusaha yang berbisnis dan menghasilkan sampah menyertakan dalam perencanaan usahanya. Tujuannya sampah dari usaha bisa dikelola dengan baik. "Jadi setiap pengusaha sudah mempunyai plan pengelolaan sampah dari hasil usahanya. Sehingga tidak akan menambah persoalan baru," pintanya. (Sni)-e



Membudayakan Kreativitas Dorong Pengembangan Inovasi Daerah

TUNTUTAN zaman yang serba cepat mendorong dibutuhkan perubahan budaya kerja baru di lingkungan pemerintah, yakni dengan bekerja secara efektif, totalitas dan berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, penting pula untuk menerapkan prinsip kolaborasi serta pola pikir yang cerdas dalam melayani masyarakat. Untuk mewujudkan perubahan-perubahan tersebut, Pemda perlu melakukan inovasi.



Bupati Sleman Kustini

Sebagai gambaran, pendidikan sebagai kebutuhan dasar saat ini telah memanfaatkan teknologi digital dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Setiap calon siswa baik di tingkat SD hingga SMA wajib mendaftar melalui PPDB online. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi menjadi kebutuhan mutlak untuk dipenuhi dalam mewujudkan layanan publik yang mudah, cepat, responsif dan terjangkau.

Dilatari dengan tuntutan kemudahan akses, kecepatan respons serta keterjangkauan ini, Pemkab Sleman berupaya menumbuhkembangkan praktik-praktik inovasi serta memacu kreativitas yang mendukung praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Salah satunya melalui regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah. Upaya ini diharapkan dapat menguatkan ekosistem inovasi yang sesuai kebutuhan daerah, meningkatkan kuantitas, kualitas dan manfaat inovasi daerah sehingga mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengintegrasikan data inovasi di Kabupaten Sleman.

Upaya ini telah membuahkan hasil yang diapresiasi di tingkat nasional. Pada tahun 2022, Sleman berhasil meraih predikat 'Inovatif' da-

lam ajang Innovative Government Award yang digagas Kementerian Dalam Negeri. Dalam ajang ini Sleman tercatat meraih skor Indeks Inovasi Daerah (IID) sebesar 58,31 dan menempati peringkat ke-37 untuk kluster Kabupaten dari 415 kabupaten. Hasil ini meningkat 4,82 dibanding tahun sebelumnya.

Pada tahun ini, Sleman kembali mengikuti ajang serupa dengan mengusung 48 inovasi unggulan. Di bidang kesehatan Sleman mengusung sejumlah inovasi diantaranya Totalitas Besti (Tolong tangani dan Fasilitas Bumil dan Balita dari Risiko Tinggi) serta GASBRO (Gerakan Keluarga Sehat Bebas Asap Rokok). Di bidang layanan administrasi kependudukan, Dinas Dukcapil juga meluncurkan inovasi Yanduk Daring (Pelayanan Adminduk Online) dan Jelita Jiwa (Pelayanan Jemput Bola Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Sakit Berat, Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas dan Orang dengan Gangguan Jiwa). Masih banyak lagi inovasi layanan administrasi di tingkat Kapanewon, serta inovasi-inovasi yang ebsifat internal pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat baik di bidang pendidikan, perhubungan dan kebencanaan.

Berbagai inovasi yang digagas perangkat daerah dan instansi di Sleman membuktikan bahwa telah terbentuk budaya inovasi. Harapannya, dengan penciptaan, replikasi dan penerapan inovasi ini dapat semakin meningkatkan daya saing daerah, membuka peluang investasi untuk memajukan Kabupaten Sleman serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui tulisan ini saya mengajak seluruh instansi dan masyarakat untuk bersinergi, menggali potensi dan menciptakan inovasi untuk menjadikan Sleman lebih baik, lebih maju dan lebih sejahtera. Mari sesarengan membangun Sleman. □f



Pansus pengelolaan sampah bertemu dengan Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) Sehati Kabupaten Sleman.